



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JALALUDDIN
2. Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3. NHK : 503581

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 6.798.500.000**

1. Tanah Seluas 6100 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, WARISAN Rp. 610.000.000
2. Tanah Seluas 15690 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, WARISAN Rp. 2.353.500.000
3. Tanah Seluas 11750 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, WARISAN Rp. 1.762.500.000
4. Tanah Seluas 5550 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, WARISAN Rp. 832.500.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/350 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
6. Tanah Seluas 240 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 52.000.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT /NC11BF1GB A/T /SPM R2 Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOTOR, YAMAHA N MAX / 20P NON ABS/ SPM R2 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY /NC11CIC A/T Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
4. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 24.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 26.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.250.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	6.879.750.000
III. HUTANG	Rp.	265.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.614.750.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.